

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI AKTIVITAS SERIKAT PEKERJA/BURUH**

**Muhamad Sobri**

## **ABSTRAK**

Problema hukum baik kebijakan formulasi maupun penerapan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap pekerja seringkali menjadi sorotan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana maupun penerapannya baik saat maupun di masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan atas hak kebebasan memiliki serikat untuk pekerja/buruh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yudiris normatif yakni ingin mengkaji dari aspek formulasi kebijakan hukum maupun penerapannya terhadap tindak pidana menghalang-halangi serikat pekerja/buruh. Sumber data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dan metode analisis deskriptif kualitatif dan argumentatif. Hasil kajian hukum menjelaskan : 1) Formulasi kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berserikat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana UU menjamin pekerja/buruh dapat mempunyai serikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana dijamin dalam kovenan internasional tentang hak asasi manusia; 2) Penerapan hukum UU Serikat Pekerja/Buruh belum banyak berpihak pada pekerja/buruh, hal ini karena adanya perbedaan kepentingan dan peran yang diemban baik oleh pekerja maupun pengusaha. 3) Belum ada suatu rancangan undang-undang yang mengatur lebih kompleks mengenai perlindungan hak kebebasan berserikat, konsep dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2012 tidak memasukkan konsep tindak pidana terhadap hak-hal buruh atau tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, dalam tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia pun tidak memasukkan tindak pidana penghalangan atau pemaksaan kebebasan berserikat, yang notabene hak berserikat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Agar fungsi hukum bekerja sebagai pranata hukum di masyarakat, maka perlu ada *good will* atau kemauan kuat, ketegasan dan keadilan dari aparat hukum dalam melaksanakan undang-undang khususnya UU Serikat Pekerja/Buruh.

Kata kunci : Tindak pidana, menghalang-halangi serikat pekerja.

# **LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTION AVOID ACTIVITY OF WORKERS**

**Muhamad Sobri**

## **ABSTRACT**

Legal problems in both the formulation policy and the application of the law to cases of violations against workers are often in the spotlight. The purpose of this study is to find out how criminal law policy and its application both now and in the future in providing protection for the right to freedom of association for workers / laborers. This research method uses the normative judicial approach which is to examine the aspects of the formulation of legal policies and their application to criminal acts to obstruct trade unions. The data source uses primary, secondary and tertiary legal materials and qualitative and argumentative descriptive analysis methods. The results of the legal study explain: 1) The formulation of criminal law policy in Indonesia in protecting the right to freedom of association has been regulated in Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Labor Unions, where the Act guarantees workers / laborers to associate, gather and issue opinions as guaranteed in the international covenant on human rights; 2) The application of the law on Trade Union Laws has not been in favor of workers / laborers, this is because of differences in interests and roles assumed by both workers and employers. 3) There has not yet been a draft law that will regulate the more complex protection of freedom of association, the concept of the 2012 Criminal Code does not include the concept of criminal acts against labor rights or criminal acts in the labor field. In addition, in criminal acts against Human Rights, it also does not include criminal offenses or the imposition of freedom of association, which in fact is the right of association as part of Human Rights. In order for the legal function to work as a legal institution in the community, it is necessary to have good will, firmness and fairness from the legal apparatus in implementing the laws, especially the Trade Union Law.

Keywords: Crime Act, Union Busting